



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3374);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.197.491.788.451,00 berkurang sejumlah Rp.106.490.669.697,16 sehingga menjadi Rp.1.091.001.118.753,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Semula	Rp.1.155.619.831.911,00
Berkurang	<u>(Rp. 127.345.707.294,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.028.274.124.617,00

 2. Belanja Daerah

Semula	Rp.1.197.491.788.451,00
Berkurang	<u>(Rp. 106.490.669.697,16)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.1.091.001.118.753,84

 3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp.41.871.956.540,00
Bertambah	<u>Rp.20.855.037.596,84</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.62.726.994.136,84
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp.0,00
Tetap	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.62.726.994.136,84
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp.109.349.545.091,00
 - Berkurang (Rp. 2.370.560.514,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.106.978.984.577,00
 - b. Dana Perimbangan
 - Semula Rp.841.677.238.000,00
 - Berkurang (Rp.102.268.786.000,00)
 - Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.739.408.452.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - Semula Rp.204.593.048.820,00
 - Berkurang (Rp. 22.706.360.780,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp.181.886.688.040,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - Semula Rp.11.452.226.664,00
 - Bertambah Rp. 214.049.718,00
 - Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan Rp.11.666.276.382,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - Semula Rp.3.807.113.900,00
 - Berkurang (Rp. 120.374.000,00)
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.3.686.739.900,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Semula Rp.7.616.554.261,00
 - Bertambah Rp.1.646.521.926,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.9.263.076.187,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp.86.473.650.266,00
 - Berkurang (Rp. 4.110.758.158,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.82.362.892.108,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Semula Rp.32.001.875.000,00
 - Bertambah Rp. 432.320.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp.32.434.195.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
Semula Rp.606.854.762.000,00
Berkurang (Rp. 60.858.344.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.545.996.418.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Semula Rp.202.820.601.000,00
Berkurang (Rp. 41.842.762.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.160.977.839.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah
Semula Rp.49.525.654.000,00
Berkurang (Rp.36.796.100.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp.12.729.554.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Semula Rp.42.362.987.820,00
Bertambah Rp. 1.024.149.854,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp.43.387.137.674,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Semula Rp.112.704.407.000,00
Bertambah Rp. 13.065.589.366,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp.125.769.996.366,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
Semula Rp.656.280.367.775,00
Berkurang (Rp. 22.711.721.970,16)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.633.568.645.804,84
- b. Belanja Langsung
Semula Rp.541.211.420.676,00
Berkurang (Rp. 83.778.947.727,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.457.432.472.949,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 Semula Rp.466.300.319.193,00
 Berkurang (Rp. 35.530.452.301,00)
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
 Rp.430.769.866.892,00
- b. Belanja Hibah
 Semula Rp.46.220.374.826,00
 Bertambah Rp. 1.437.319.098,84
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
 Rp.47.657.693.924,84
- c. Belanja Bantuan Sosial
 Semula Rp. 800.000.000,00
 Bertambah Rp.5.529.300.000,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
 perubahan Rp.6.329.300.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil kepada
 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 Semula Rp.1.525.934.056,00
 Bertambah Rp. 13.013.850,00
 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 setelah perubahan Rp.1.538.947.906,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 Semula Rp.137.433.739.700,00
 Berkurang (Rp. 5.160.902.618,00)
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 setelah perubahan Rp.132.272.837.082,00
- f. Belanja Tidak Terduga
 Semula Rp. 4.000.000.000,00
 Bertambah Rp.11.000.000.000,00
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
 Rp.15.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai
 Semula Rp.35.822.640.896,00
 Bertambah Rp. 276.861.063,00
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
 Rp.36.099.501.959,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 Semula Rp.283.622.660.118,00
 Berkurang (Rp. 15.295.804.376,00)
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
 perubahan Rp.268.326.855.742,00

- c. Belanja Modal
 Semula Rp.221.766.119.662,00
 Berkurang (Rp. 68.760.004.414,00)
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
 Rp.153.006.115.248,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 Semula Rp.41.871.956.540,00
 Bertambah Rp.20.855.037.596,84
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp.62.726.994.136,84
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 Semula Rp.0,00
 Tetap Rp.0,00
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp.0,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
 Semula Rp.41.871.956.540,00
 Bertambah Rp.20.855.037.596,84
 Jumlah SiLPA setelah perubahan
 Rp.62.726.994.136,84
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 Semula Rp.0,00
 Tetap Rp.0,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp.0,00
- (4) Pembiayaan Netto
 Semula Rp.41.871.956.540,00
 Bertambah Rp.20.855.037.596,84
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
 Rp.62.726.994.136,84
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan APBD sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas

- kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
 - (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
 - (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - (6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - (7) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran II.a Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran II.b Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
5. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
9. Lampiran VII.a Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Lampiran VII.b Daftar Piutang Daerah Kabupaten Dompus;
11. Lampiran VIII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
12. Lampiran IX Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
13. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 23 Oktober 2020


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 24 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



H. MUHIBUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 55 TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)	
1.1.1.4		841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)	
1.2	DANA PERIMBANGAN	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
2	BELANJA	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)	
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)	
2.1.1.1	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16	
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85	
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)	
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00	
2.1.1.8		541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)	
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)	
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)	
2.2.2.2	Belanja Modal	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)	

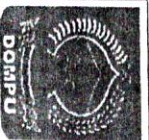
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.871.956.540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMPU, 23 October 2020

Bupati Dompnu



H. Bambang M. Yasin



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 02 Tahun 2020
Tanggal : 23 October 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5		
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)	
1.2	DANA PERIMBANGAN	841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59	
2	BELANJA	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)	
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)	
2.1.4	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)	
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)	
2.2.3	Belanja Modal	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)	

NOMOR URUT	URAIAN	PERUBAHAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		(41.871.956.540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMPU, 23 October 2020
 Bupati Dompu

H. Bambang M. Yasin





**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

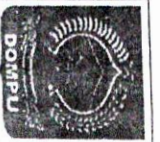
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)
1.2	DANA PERIMBANGAN	841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35
1.2.2	Dana Alokasi Umum,	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)
1.3.1	Pendapatan Hibah	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59
2	BELANDA	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)
2.1.1.4	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16
2.1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)
2.2.3	Belanja Modal	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5 (Rp)	6 %
1					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.871.956.540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMPU, 23 October 2020
 Bupati Dompu


 H. Bambang M. Yasin



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)
1.1	PENDAPATAN ASIL DAERAH	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)
1.1.1.4	DANA PERIMBANGAN	841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)
1.2	DANA PERIMBANGAN	841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35
1.2.2	Dana Alokasi Umum	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)
1.2.2.2	Dana Alokasi Khusus	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)
1.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)
1.3	Pendapatan Hibah	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59
1.3.4					
2	BELANJA	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)
2.1.1.1	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00
2.1.1.8	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77
2.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)
2.2.2	Belanja Modal	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)
2.2.3					

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp)	%
1					
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.871.956.540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMPU, 23 October 2020

Bupati Dompu



H. Bambang M. Yasin



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 02 Tahun 2020
Tanggal : 23 October 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.028.274.124.617,00	(127.345.707.294,00)	(11,02)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.349.545.091,00	106.978.984.577,00	(2.370.560.514,00)	(2,17)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.666.276.382,00	214.049.718,00	1,87
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.686.739.900,00	(120.374.000,00)	(3,16)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	9.263.076.187,00	1.646.521.926,00	21,62
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	82.362.892.108,00	(4.110.758.158,00)	(4,75)
1.1.1.4		841.677.238.000,00	739.408.452.000,00	(102.268.786.000,00)	(12,15)
1.2	DANA PERIMBANGAN	32.001.875.000,00	32.434.195.000,00	432.320.000,00	1,35
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	606.854.762.000,00	545.996.418.000,00	(60.858.344.000,00)	(10,03)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	202.820.601.000,00	160.977.839.000,00	(41.842.762.000,00)	(20,63)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	204.593.048.820,00	181.886.688.040,00	(22.706.360.780,00)	(11,10)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.525.654.000,00	12.729.554.000,00	(36.796.100.000,00)	(74,30)
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.362.987.820,00	43.387.137.674,00	1.024.149.854,00	2,42
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.704.407.000,00	125.769.996.366,00	13.065.589.366,00	11,59
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
2	BELANDA	1.197.491.788.451,00	1.091.001.118.753,84	(106.490.669.697,16)	(8,89)
2.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	656.280.367.775,00	633.568.645.804,84	(22.711.721.970,16)	(3,46)
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	430.769.866.892,00	(35.530.452.301,00)	(7,62)
2.1.1.1	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	47.657.693.924,84	1.437.319.098,84	3,11
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	6.329.300.000,00	5.529.300.000,00	691,16
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.538.947.906,00	13.013.850,00	0,85
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	132.272.837.082,00	(5.160.902.618,00)	(3,76)
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	275,00
2.1.8		541.211.420.676,00	457.432.472.949,00	(83.778.947.727,00)	(15,48)
2.2	BELANDA LANGSUNG	35.822.640.896,00	36.099.501.959,00	276.861.063,00	0,77
2.2.1	Belanja Pegawai	283.622.660.118,00	268.326.855.742,00	(15.295.804.376,00)	(5,39)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.766.119.662,00	153.006.115.248,00	(68.760.004.414,00)	(31,01)
2.2.3	Belanja Modal				

NOMOR URUT	URATAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERKAMBIAN / (BERKURANG)	
		3	4	5 (Rp)	6 %		
1	2						
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.871.956,540,00)	(62.726.994.136,84)	(20.855.037.596,84)	49,81		
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	62.726.994.136,84	20.855.037.596,84	49,81		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOMPU, 23 October 2020
 Bupati Dompu


 H. Bambang M. Yasin